



Empat Paket Perbaikan Jalan Dihapus

- Imbas dari Pemenuhan Anggaran MBG
- DPUPKP: Hanya Kurangi Volume Paket

KULON PROGO - Implementasi program makan bergizi gratis cukup banyak berdampak pada realisasi APBD 2025. Pemangkasan anggaran 11 persen per organisasi perangkat daerah (OPD), turut berimbas pada pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo.

Bahkan, ada empat paket pekerjaan perbaikan jalan yang dihapus pada 2025.

Penghapusan diperlukan untuk memenuhi kuota anggaran demi realisasi program makan bergizi gratis. Sejumlah ruas jalan tersebut, ada di Kapanewon Kokap dan Girimulyo. Padahal, sebelumnya telah dianggarkan untuk perbaikan tahun depan.

"Ada empat ruas jalan, salah satunya yang di daerah Klepu," sebut sumber yang tak ingin namanya dikorbankan kemarin (29/12).

Disebutkan, program makan bergizi gratis membuat realisasi perbaikan gagal. Lantaran, Pemkab perlu berkontribusi ke program MBG sejumlah 7,75 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kecilnya PAD tak mampu menutup kebutuhan anggaran. Sehingga, setiap OPD dipangkas sebesar 11 persen.

Oleh sebab itu, DPUPKP sebagai OPD perlu merefocusing anggaran. Salah satu yang berdampak adalah sektor infrastruktur. Pemangkasan, membuat sejumlah ruas yang telah dianggarkan



ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA

BENTUK PROTES: Warga Klepu, Hargowilis, Kokap memasang spanduk sindiran untuk kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki.

dihapus dari daftar perbaikan 2025.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nur-

cahyo Budi Wibowo membenarkan perihal adanya pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran di

DPUPKP bahkan mencapai Rp 3,7 miliar. Terdapat tiga bidang yang mengalami pemangkasan. Yaitu bidang bina marga, sumber daya air (SDA), dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

"Pemangkasan cukup besar bagi kami di bina marga sebesar Rp 2,6 miliar," ucapnya.

Namun Nur menyangkal adanya penghapusan empat paket pekerjaan perbaikan jalan. Namun hanya pengurangan volume pekerjaan hingga 50 persen pada setiap paket. Nantinya, terdapat 23 paket pekerjaan pemeliharaan, dan perencanaan jalan

yang dikurangi volumenya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Angga Pratama turut membenarkan terjadinya penghapusan paket jalan. Hal ini didasari pada rapat DPRD dengan Bappeda Kulon Progo.

"Memang ada yang dihapus, detailnya bisa langsung ke pihak terkait," ucapnya.

Angga menilai, PAD Kulon Progo tergolong kecil membuat pelaksanaan program MBG membebani anggaran. Sehingga, Pemkab seharusnya berfokus untuk menggenjot PAD. (gas/eno/by)